UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA MODAL, DAN INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN/ KOTA PROVINSI PAPUA TAHUN 2011-2015
AZIZUL HAKIM, Dra. Ike Yuli Andjani, M. Si
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

The Human Development Index (HDI) is an index that is structured as an important indicator to measure success in an effort to build the quality of life of a community or population in a country or region based on three important elements in people's lives, namely income, health and education. This is influenced by many factors including capital expenditure allocation, growth, and costliness of construction. Papua Province is the province with the lowest human development quality compared to other provinces. In 2015 HDI papua still in the figure below 60. The low quality of human development in the province of Papua can not be separated from the quality of human development districts / cities in it which is a forming component of the figure. The objectives of this study were to analyze the improvement of HDI, economic growth, capital expenditure allocation, and the level of cost of district / city construction in Papua Province 2010-2015, and to estimate the effect of economic growth, capital expenditure allocation, and construction cost level on Human Development Index (HDI) of districts / municipalities in Papua Province in 2010-2015. The analytical tool used is descriptive statistical analysis and panel data regression analysis or time series data from 2011-2015 and cross section data from 10 (ten) districts / cities in Papua Province. The results of this study indicate that human development of Papua continues to progress during the period 2010 to 2015 HDI Papua increased from 54.45 in 2010 to 57.25 in 2015. Nduga District is the district with the lowest HDI in Papua only 25.47, While occupying the top position is the city of Jayapura with the achievement of HDI is 78.56. The highest average capital expenditure during the period 2010-2015 was found in Merauke Regency amounting to Rp45,433,253,567 while the lowest was in Biak Numfor regency Rp11,947,054,367. Economic growth proxied by GDP of the highest Constant Price reached 54.809 Trillion Rupiah reached by Mimika Regency, the lowest amount of 456.8 Billion Rupiah reached by Yalimo Regency. In 2015, the highest Construction Cost Index is in Puncak Regency of 449.72 while the lowest is in Jayapura Regency of 131.25.The results of regression calculations indicate that Together or simultaneous allocation of capital expenditure, economic growth, and CCI have a significant influence on HDI district / city in Papua Province in 2011-2015. While partially only CCI variables that have a significant influence on HDI, allocation of capital expenditure and economic growth its influence is not significant.

Keywords: HDI, Capital Expenditure, Economic Growth, CCI

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA MODAL, DAN INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN/ KOTA PROVINSI PAPUA TAHUN 2011-2015
AZIZUL HAKIM, Dra. Ike Yuli Andjani, M. Si
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah (Otoda) yang diundangkan pada tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan Otoda adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah terutama yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan terdesentralisasi yang telah diterapkan selama ini membutuhkan suatu indikator guna perimbangan keuangan daerah otonom. Salah satu dana perimbangan tersebut ialah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21. DAU merupakan instrument transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus memeratakan

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA MODAL, DAN INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN/ KOTA PROVINSI PAPUA TAHUN 2011-2015
AZIZUL HAKIM, Dra. Ike Yuli Andjani, M. Si
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

kemampuan antar daerah. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) disamping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita.

Pengertian pembangunan itu sangat luas tidak hanya sekedar proses peningkatan GNP per kapita saja, tetapi juga bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek (ekonomi, social, dan politik) dalam kehidupan masyarakat. Jadi proses kenaikan pendapatan per kapita secara terus menerus dalam jangka panjang saja tidak cukup bagi kita untuk mengatakan telah terjadi pembangunan ekonomi, tetapi perbaikan struktur social, sistem kelembagaan (baik organisasi maupun aturan main), dan perubahan sikap dan perilaku masyarakat juga merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi (Arsyad, 2010).

Di dalam Arsyad (2010) berdasasarkan publikasi UNDP (1996) mengatakan bahwa hubungan pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi sangat erat sekali dan merupakan prasyarat tercapainya pembangunan manusia, karena peningkatan pembangunan ekonomi akan mendukung peningkatan produktivitas melalui pengisian kesempatan kerja dengan usaha-usaha produktif sehingga tercipta peningkatan pendapatan.

Ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat atau kualitas pembangunan manusia pada suatu negara atau daerah dapat tercermin dari nilai IPM-nya, IPM merupakan indeks yang disusun sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat atau penduduk

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA MODAL, DAN INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN/ KOTA PROVINSI PAPUA TAHUN 2011-2015
AZIZUL HAKIM, Dra. Ike Yuli Andjani, M. Si
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

di suatu negara atau daerah berdasarkan tiga elemen penting dalam kehidupan masyarakat yaitu pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam hal ini, peran pemerintah merupakan faktor yang sangat penting, bagaimana arah kebijakan-kebijakan pemerintah suatu negara atau daerah tersebut memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap aspek pembangunan manusianya.

Dalam anggaran belanja dan pendapatan baik di tingkat negara ataupun daerah terdapat komponen penting yang dapat mendukung proses percepatan pembangunan manusia, yaitu komponen belanja yang bersentuhan langsung manfaatnya dengan masyarakat. Belanja tersebut adalah belanja modal yang termasuk kedalam alokasi belanja langsung di dalam APBN/APBD. Berdasarkan PP No 58 Tahun 2005, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. Mardiasmo (2002) dalam Prio dan Fhino (2009) menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan ini. Sejalan dengan peningkatan pelayanan ini (yang ditunjukkan dengan peningkatan belanja modal) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diharapkan.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA MODAL, DAN INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN/ KOTA PROVINSI PAPUA TAHUN 2011-2015
AZIZUL HAKIM, Dra. Ike Yuli Andjani, M. Si
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Indonesia merupakan negara kepulauan dan termasuk negara dengan jumlah penduduk terbanyak didunia, sehingga pembangunan harus dilakukan secara merata dan adil disetiap dearah. Berikut adalah data pembangunan manusia seluruh Provinsi di Indonesia yang digambarkan melalui angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM):

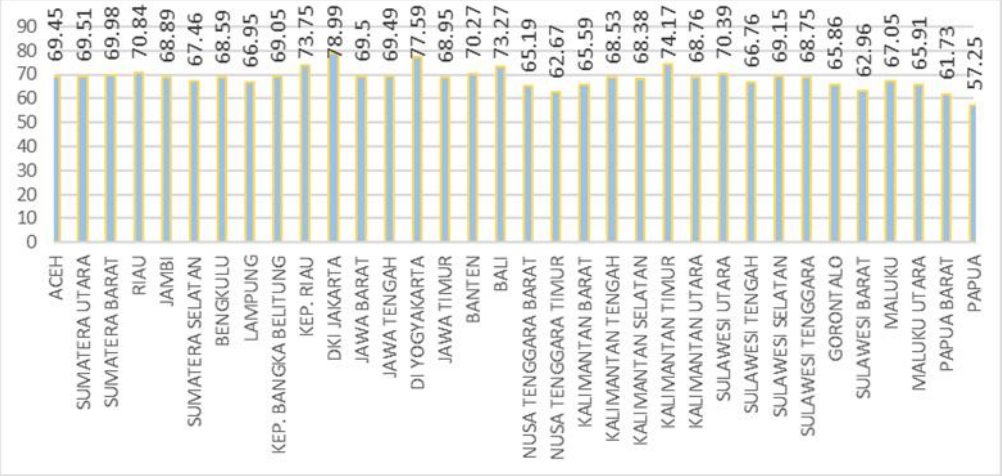

Grafik 1.1 Nilai IPM seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2015
Sumber: BPS, 2015 (diolah)

Dari grafik diatas dapat kita lihat data pembangunan manusia di Indonesia, berdasarkan pengelompokan capaian status pembangunan manusia oleh BPS Indonesia, Provinsi Papua merupakan provinsi dengan kualitas pembangunan manusia paling rendah dibandingkan provinsi lainnya. Pada tahun 2015 IPM papua masih berada pada angka dibawah 60, hal ini menggambarkan bagaimana pembangunan manusia di Papua masih belum efektif, sehingga pemerintah daerah perlu memikirkan lagi strategi pembangunan yang lebih baik dan lebih berpihak kepada masyarakat dalam hal ini melalui alokasi belanja modal sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA MODAL, DAN INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN/ KOTA PROVINSI PAPUA TAHUN 2011-2015
AZIZUL HAKIM, Dra. Ike Yuli Andjani, M. Si
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Halim (2002) dalam Ariza (2013) mengemukakan bahwa definisi belanja modal mempunyai kesamaan dimensi dengan definisi belanja pembangunan. Belanja tersebut termasuk didalamnya belanja gedung, jalan, jembatan dan belanja lain yang masih berkaitan erat dengan konstruksi bangunan. Tingkat kemahalan konstruki yang tinggi akan mempengaruhi alokasi belanja pembangunan pemerintah jika tidak diirngi dengan porsi pendapatan yang seimbang.

Kemahalan konstruksi suatu negara atau daerah digambarkan melalui Indeks Kemahalan Knostruksi (IKK). IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. IKK yang tinggi menggambarkan buruknya kondisi infrastruktur di suatu daerah, infrastruktur yang buruk mengakibatkan aksesibilitas daerah tersebut sangat sulit sehingga mobilisasi menjadi rendah dan berdampak pada kegiatan ekonomi suatu negara atau daerah, sehingga akan menghambat daerah dalam proses pembangunan manusia di suatu negara atau daerah tersebut. Berikut adalah data kemahalan konstruksi seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2015:

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA MODAL, DAN INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN/ KOTA PROVINSI PAPUA TAHUN 2011-2015
AZIZUL HAKIM, Dra. Ike Yuli Andjani, M. Si
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

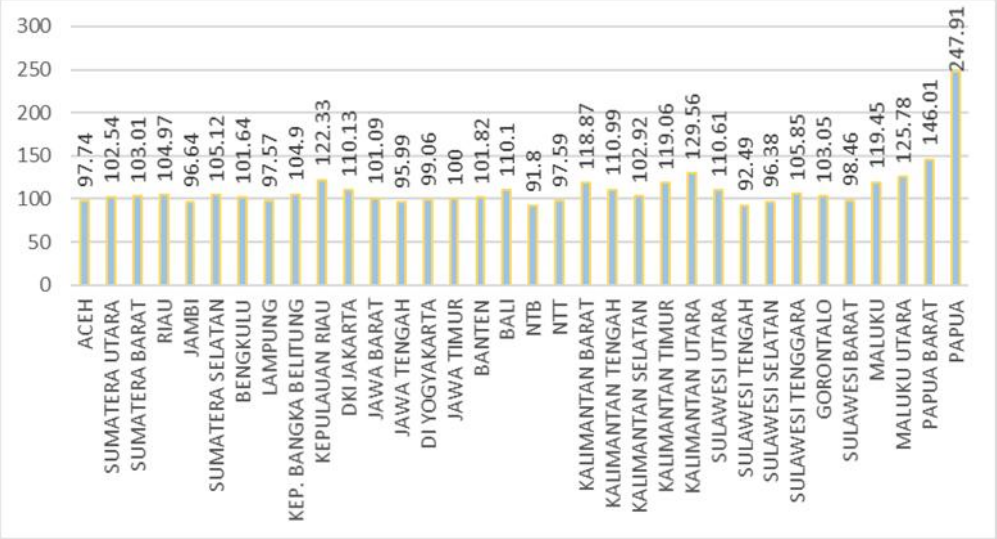

Grafik 1.2 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi di Indonesia tahun 2015
Sumber: BPS, 2016 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas terlihat Provinsi Papua memiliki nilai IKK tertinggi menjejaki angka di atas 200. Angka tersebut menggambarkan letak geofrafis dan infrastrukur yang masih buruk sehingga kemahalan konstruksi sangat tinggi dan ini mugnkin mempengaruhi berlangsungnya proses pembangunan di Provinsi Papua.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan melihat, dan mengetahui sejauh mana hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dalam mewujudkan terciptanya pembangunan manusia, sejauh mana dampak kebijakan pemerintah terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang digambarkan melalui alokasi belanja modal terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia, serta aspek kemahalan konstruksi yang mungkin mempengaruhi berlangsungnya proses pembangunan di Provinsi Papua.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA MODAL, DAN INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN/ KOTA PROVINSI PAPUA TAHUN 2011-2015
AZIZUL HAKIM, Dra. Ike Yuli Andjani, M. Si
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Penelitian ini juga untuk membuktikan hipotesis peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Iskandar Muda, dkk (2014) terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dengan memasukkan variable aspek kemahalan konstruksi untuk melengkapi penelititan sebelumnya dalam penelitiannya, dengan sampel 25 pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2005-2011 dengan pengembangan hipotesis bahwa Semakin tinggi Indeks Kemahalan Konstruksi suatu daerah maka semakin rendah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai koefisien sebesar 0.016, artinya setiap pertambahan 1 % variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) maka akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0.016 satuan.

Oleh Karena itu, peneliti juga tertarik untuk melakukan kajian dengan topik yang sama dengan memasukkan variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) untuk membuktikan hasil penelitian tersebut, karena jika dilihat dari data IKK seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2015 ada provinsi yang memiliki IKK diatas 100 namun IPM-nya juga memiliki nilai yang tinggi, dan IPM juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut tanpa terpengaruh dengan naik turunnya angka IKK, seperti Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai IKK berada di atas angka 100 dan pada tahun 2015 menempati posisi ketiga nilai IPM tertinggi setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA MODAL, DAN INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN/ KOTA PROVINSI PAPUA TAHUN 2011-2015
AZIZUL HAKIM, Dra. Ike Yuli Andjani, M. Si
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, nilai IPM Papua selama periode 2010-2015 terus tumbuh namun masih tergolong rendah dan berada di bawah rata-rata IPM nasional dan pada tahun 2015 masih menempati posisi terbawah dari nilai IPM seluruh provinsi di Indonesia, seharusnya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Pembangunan manusia juga di pengaruhi oleh kebijakan pemerintah, dimana alokasi belanja pemerintah yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat juga turut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu , penulis tertarik melakukan kajian dan membahas bagaimanakah pengaruh pertumbuhan alokasi belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan tingkat kemahalan konstruksi terhadap kondisi pembangunan manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2011-2015.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis peningkatan IPM, pertumbuhan ekonomi, alokasi belanja modal, dan tingkat kemahalan konstruksi kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2010-2015.
2. Mengestimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, alokasi belanja modal, dan tingkat kemahalan konstruksi terhadap Indeks Pambangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2010-2015.

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA MODAL, DAN INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN/ KOTA PROVINSI PAPUA TAHUN 2011-2015
AZIZUL HAKIM, Dra. Ike Yuli Andjani, M. Si
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

1.4 Manfaat Penulisan

a. Bagi Penulis

Sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar ahli madya dan sekaligus sebagai media untuk menuangkan ide dan melatih idealisme dalam berpikir analitis dan kritis.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan acuan dalam merancang dan menerapkan kebijakan sehingga kebijakan yang diambil akan lebih memperhatikan aspek kesejaheteraan masyarakat.

c. Bagi Universitas

Menjadi bahan bacaan dan acuan di perpustakaan universitas serta menambah koleksi karya ilmiah tentang pembangunan manusia di perpustakaan universitas.

d. Bagi Pembaca

Sebagai penambah ilmu dan wawasan tentang pembangunan manusia dan aspek yang mempengaruhinya serta dapat menjadi sumber referensi utnuk penelitian yang akan mendatang.

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA MODAL, DAN INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN/ KOTA PROVINSI PAPUA TAHUN 2011-2015
AZIZUL HAKIM, Dra. Ike Yuli Andjani, M. Si
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

1.5 Kerangka Penulisan

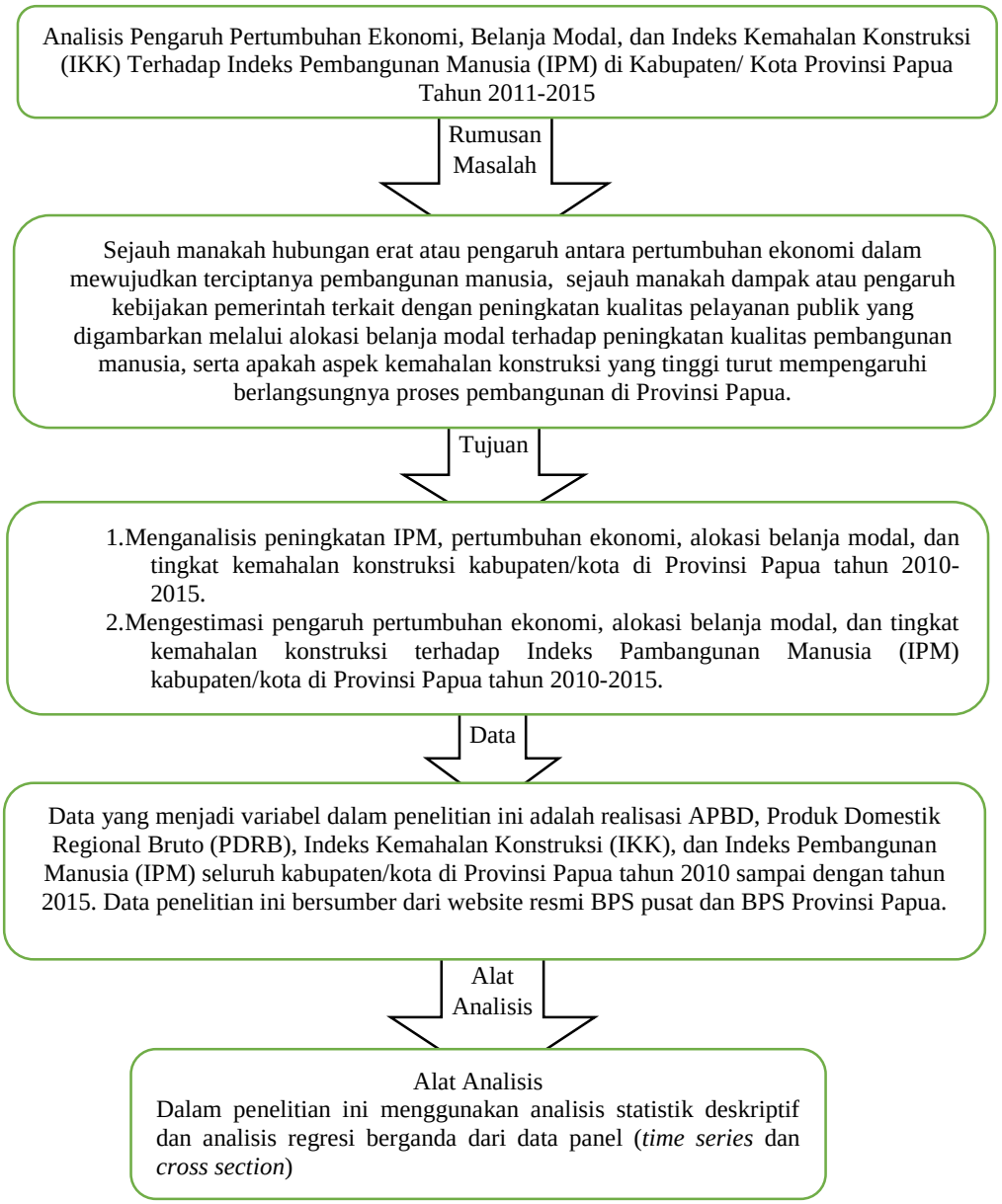

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA MODAL, DAN INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN/ KOTA PROVINSI PAPUA TAHUN 2011-2015
AZIZUL HAKIM, Dra. Ike Yuli Andjani, M. Si
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB II

GAMBARAN UMUM PENULISAN

2.1 Kondisi Umum Provinsi Papua

2.1.1 Geografis dan topografi Provinsi Papua

Provinsi Papua adalah provinsi di ujung timur Indonesia dengan luas mencapai 316.553,07 km2 yang menjadikan Provinsi Papua sebagai provinsi terluas di Indonesia. Secara geografis Provinsi Papua terletak antara 2025' – 900' Lintang Selatan dan 13000' – 14100' Bujur Timur. Berbatasan dengan Samudera Pasifik di bagian utara dan Laut Arafuru di bagian selatan, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Papua Barat serta sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea.

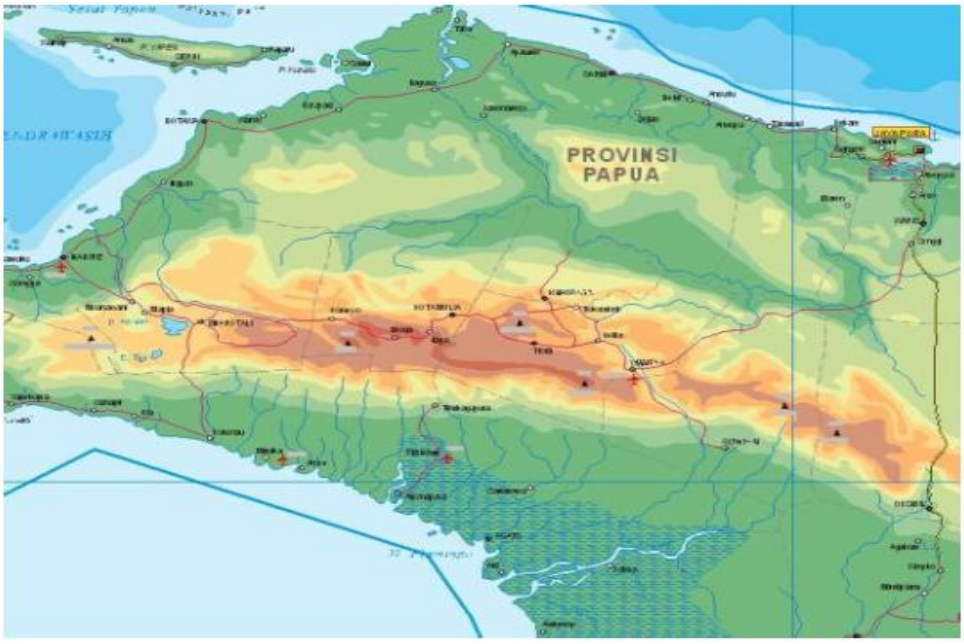

Gambar 2.1 Peta pulau Provinsi Papua

Sumber: BPS, 2016

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA MODAL, DAN INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN/ KOTA PROVINSI PAPUA TAHUN 2011-2015
AZIZUL HAKIM, Dra. Ike Yuli Andjani, M. Si
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Secara administratif Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan satu kota. Kabupaten terluas di Provinsi Papua adalah Kabupaten Merauke dengan luas mencapai hingga 47.406,90 km2 atau menempati hingga 14,98 persen wilayah Provinsi Papua. Sebaliknya wilayah terkecil adalah Kabupaten Supiori yang hanya menempati 0,20 persen wilayah Provinsi Papua atau hanya seluas 634,24 km2. Kota Jayapura merupakan ibukota Provinsi Papua, dimana pemerintahan maupun perekonomian terpusat di kota ini. Wilayah terjauh dari ibukota Provinsi Papua adalah Kabupaten Merauke yang berjarak hingga 1.937 km.

Selain berupa daratan, Provinsi Papua juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan lautan yaitu Laut Arafuru dan Samudera Pasifik. Keadaan ini membuat Papua sangat kaya akan potensi di bidang perikanan laut tangkap. Kabupaten Mimika dan Mamberamo Raya merupakan dua kabupaten yang memiliki luas wilayah laut terluas yaitu masing-masing 2.832,30 km2 dan 1.650 km2. Pengembangan ekonomi berdasarkan potensi ikan tangkap sangat potensial. Selain karena letaknya yang berbatasan dengan laut, Provinsi Papua juga merupakan kawasan strategis nasional karena berbatasan langsung dengan Papua New Guinea dan Australia di mana sebagian pulau yang berbatasan dengan kedua negara tersebut ada yang berpenduduk dan ada yang tidak berpenduduk.

Wilayah Provinsi Papua terdiri dari wilayah dataran rendah, pesisir dan pegunungan yang berada pada ketinggian diantara 0 - 3.000 meter dari permukaan laut (mdpl). Wilayah tertinggi terdapat di Kabupaten Puncak Jaya